



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan ketentuan pasal 295 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Laporan Keuangan SKPD disusun oleh Pejabat Pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 pada hakikatnya merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan OPD. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi dan perubahan ekuitas selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual terdiri atas:

1. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
3. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.



4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Neraca, LO, dan LPE.

Laporan Keuangan RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi kegiatan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus dalam menyusun laporan keuangan mendasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



- 2013 Nomor 690);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
 19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
 20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019;
 21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus.
 22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus TA 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan,



hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen Pendapatan, Beban, Belanja, Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Bab IV Penjelasan atas Informasi Non Keuangan, menjelaskan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari non APBD.

Bab V Penutup.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019

Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran (TA) 2019 secara ringkas disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini

Tabel 2.1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan TA. 2019 (Rp)	Realisasi TA. 2019 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA. 2018 (Rp)
1	Pendapatan	130.753.350.000	134.051.743.183	102,52	145.957.396.619
2	Belanja	209.697.518.000	186.971.547.580	89,16	199.641.000.525

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, nampak bahwa:

1. Realisasi Pendapatan RSUD dr. Loekmono Hadi TA 2019 sebesar Rp. 134.051.743.183,- atau 102,52% dari anggaran sebesar Rp. 130.753.350.000,-. Realisasi pendapatan ini turun sebesar Rp.11.905.653.436,- atau sebesar 8,16 % dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp. 145.957.396.619,-. Penurunan pendapatan ini disebabkan karena pelayanan BPJS bulan Oktober, Nopember, dan Desember 2019 belum terbayar di tahun 2019.
2. Realisasi Belanja RSUD dr. Loekmono Hadi TA 2019 sebesar Rp. 186.971.547.580,- atau 89,16% dari anggaran sebesar Rp. 209.697.518.000,-. Realisasi Belanja ini turun sebesar Rp 12.669.452.945,- atau sebesar 6,78% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp. 199.641.000.525,-. Penurunan belanja ini disebabkan karena penurunan pendapatan.

B. Ikhtisar Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019

Realisasi Belanja TA 2019 sebesar Rp. 186.971.547.580,- terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 31.345.980.800,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 142.263.473.050,-



Belanja Tidak Langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS. Realisasi Belanja Langsung dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dalam 3 (tiga) kegiatan.

Ikhtisar realisasi Belanja Langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Langsung TA 2019
berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Realisasi (Rp)
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok (DBHCHT))	10.968.973.730
2	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	
	Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	2.393.120.000
2	Program Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	142.263.473.050

2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pada Pos Belanja TA 2019 terealisasi 89,16 % dibandingkan dengan anggarannya, hal ini disebabkan oleh:

1. Belanja modal pada Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK) yang berupa Pengadaan Alat Laboratorium tidak dilaksanakan oleh PPKom karena kualifikasi barang dalam anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan user.
2. Efisiensi pada belanja BLUD.



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENJELASAN POS PENDAPATAN

Pendapatan yang dikelola oleh OPD RSUD dr. Loekmono Hadi yang berupa jasa layanan BLUD merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi Pendapatan OPD RSUD dr. Loekmono Hadi TA 2019 sebesar Rp.134.051.743.183,- atau 102,52% dari anggaran sebesar Rp. 130.753.350.000,-.

Realisasi pendapatan ini turun sebesar Rp. 11.905.653.436,- atau sebesar 8,16 % dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp.145.957.396.619,- dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1 Pendapatan Asli Daerah	130.753.350.000	134.051.743.183	102,52	145.957.396.619
> Lain-lain PAD yang sah	130.753.350.000	134.051.743.183	102,52	145.957.396.619
- Pendapatan BLUD	130.753.350.000	134.051.743.183	102,52	145.957.396.619

Rincian realisasi pendapatan BLUD sebesar Rp. 134.051.743.183- sebagai berikut :

1. Pendapatan Jasa Layanan Rp.130.251.330.194,-

Terdiri dari :

- 1) Pelayanan IGD Rp. 7.067.630.307,-
- 2) Pelayanan Rawat Intensif Rp. 11.523.920.695,-
- 3) Pelayanan Rawat Inap Rp. 22.353.462.590,-
- 4) Pelayanan Poliklinik Rp. 13.910.381.470,-
- 5) Pelayanan IBS Rp. 6.282.872.956,-
- 6) Pelayanan Persalinan Rp. 648.590.762,-
- 7) Pelayanan Laboratorium Rp. 12.945.060.159,-
- 8) Pelayanan Radiologi Rp. 6.099.887.194,-



9) Pelayanan Rehabilitasi Medik	Rp.	662.661.025,-
10) Pelayanan Farmasi	Rp.	44.106.463.823,-
11) Pelayanan Gizi	Rp.	3.612.857.578,-
12) Pelayanan Ambulance	Rp.	241.101.531,-
13) Pelayanan Diklat	Rp.	80.500.000,-
14) Pelayanan Adm.& umum	Rp.	715.940.104,-
2. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		Rp. 3.800.412.989,-
Terdiri dari :		
1) Jasa Giro	Rp.	1.705.809.450,-
2) Parkir	Rp.	30.000.000,-
3) Sewa Tempat	Rp.	296.545.425,-
4) Study Banding	Rp.	7.350.000,-
5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran	Rp.	134.074.146,-
6) Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS	Rp.	1.624.233.968,-
7) Meterai	Rp.	2.400.000,-
<p>➤ Lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang berasal dari sewa tempat sebesar Rp. 296.545.425,- merupakan penerimaan dari penggunaan sebagian aset tanah dan bangunan milik RSUD dr.Loekmono Hadi dengan perjanjian kepada pihak ketiga yang terdiri dari :</p>		
• Penyediaan Fasilitas Telekomunikasi PT MAC Jakarta	Rp.	164.000.000,-
• Sewa tanah PD Apotik Pemda Kudus	Rp.	23.942.400,-
• Sewa tanah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kudus	Rp.	18.330.900,-
• Sewa lahan dan bangunan Franchisee Teh cap Peci	Rp.	37.264.000,-
• Sewa Kios 13 PKL	Rp.	5.338.125,-
• Sewa Bangunan Koperasi Mukti Rahayu	Rp.	43.800.000,-
• Sewa Rumah Dinas	Rp.	<u>3.870.000,-</u>
Jumlah	Rp.	296.545.425,-



- Pengembalian Kelebihan Pembayaran sebesar Rp 134.074.146,- adalah kelebihan pembayaran atas temuan pemeriksaan Inspektorat
- Pendapatan Meterai sebesar Rp. 2.334.000,- adalah pendapatan meterai yang berasal dari bukti pembayaran bermeterai yang dibebankan kepada pasien.

B. PENJELASAN POS BELANJA.

Realisasi Belanja OPD RSUD dr. Loekmono Hadi TA 2019 sebesar Rp.186.971.547.580,- atau 89,16% dari anggaran sebesar Rp. 209.697.518.000,-. Belanja OPD RSUD dr. Loekmono Hadi ini turun sebesar Rp. 12.669.452.945,- atau sebesar 6,35% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp. 199.641.000.525,-.

Rincian realisasi belanja adalah sebagai berikut.

Belanja Daerah		Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Operasi	177.816.070.000	161.369.577.079	90,75	150.649.391.652
2	Belanja Modal	31.881.448.000	25.601.970.501	80,30	48.991.608.873
Jumlah		209.697.518.000	186.971.547.580	89,16	199.641.000.525

1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA. 2019 sebesar Rp.161.369.577.079,- atau 90,75% dari anggaran sebesar Rp.177.816.070.000,-. Belanja Operasi ini naik sebesar Rp. 10.720.185.427,- atau sebesar 7,12% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp. 150.649.391.652,-, dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi		Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
a.	Belanja Pegawai	45.481.468.000	44.362.447.630	90,75	39.774.710.293
b.	Belanja Barang	132.334.602.000	117.007.129.449	88,42	110.874.681.359
Jumlah		177.816.070.000	161.369.577.079	93,79	150.649.391.652



a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp. 44.362.447.630,- atau 97,54% dari anggaran sebesar Rp. 45.481.468.000,-.

Realisasi belanja pegawai ini naik sebesar Rp. 4.587.737.337,- atau 11,53% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp. 39.774.710.293, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai		Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1)	Gaji Dan Tunjangan	32.047.152.000	31.345.980.800	97,81	29.244.652.093
2)	Belanja Pegawai BLUD (BL)	13.434.316.000	13.016.466.830	96,89	10.530.058.200
Jumlah		45.481.468.000	44.362.447.630	97,54	39.774.710.293

1) Gaji dan Tunjangan

Realisasi Gaji dan Tunjangan TA 2019 sebesar Rp.31.345.980.800,- atau 97,81% dari anggaran sebesar Rp.32.047.152.000,-. Realisasi gaji dan tunjangan ini naik sebesar Rp.2.101.328.707,- atau sebesar 7,19% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp. 29.244.652.093,- dengan rincian sebagai berikut :

Gaji dan Tunjangan		Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
a)	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	23.915.800.000	23.653.574.721	98,90	22.101.297.100
b)	Tunjangan Keluarga	2.375.041.000	2.260.856.916	101,47	2.260.856.916
c)	Tunjangan Jabatan	2.255.000	221.530.000	91,33	222.950.000
d)	Tunjangan Fungsional	2.581.740.000	2.447.145.000	94,79	2.178.650.000
e)	Tunjangan Fungsional Umum	374.935.000	384.085.000	102,44	344.035.000
f)	Tunjangan Beras	1.433.840.000	1.300.880.460	90,10	1.298.852.700
g)	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.099.000	61.141.742	86,12	48.502.115
h)	Pembulatan Gaji	1.131.000	364.065	32,19	291.627
i)	Iuran Jaminan Kesehatan	788.726.000	672.121.621	85,22	627.280.490
j)	Iuran Jaminan				



Gaji dan Tunjangan	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Ketenagakerjaan	252.394.000	195.230.531	77,35	161.936.145
Jumlah	32.047.152.000	31.345.980.800	97,81	29.244.652.093

2) Belanja Pegawai BLUD (BL)

Realisasi Belanja Pegawai BLUD (BL) TA 2019 sebesar Rp.13.017.816.830,- atau 96,90% dari anggaran sebesar Rp.13.434.316.000,-. Belanja Pegawai BLUD ini naik sebesar Rp.2.487.758.630,- atau sebesar 23,63% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp. 10.530.058.200,- dengan rincian sebagai berikut.

Belanja Pegawai BLUD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
a) Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	12.503.251.000	12.201.666.830	97,59	9.711.808.200
b) Lembur Pegawai Non PNS	5.625.000	0	0	0
c) Lembur Pegawai	31.315.000	0	0	0
d) Honorarium	696.675.000	633.550.000	90,94	630.450.000
e) Biaya Tunjangan Hari Raya Pegawai	197.450.000	182.600.000	92,48	187.800.000
Jumlah	13.434.316.000	13.017.816.830	96,90	10.530.058.200

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 sebesar Rp.110.874.681.359,- atau 94% dari anggaran sebesar Rp.117.955.552.000,-. Realisasi belanja barang dan Jasa ini meningkat sebesar Rp. 2.409.887.540,- atau sebesar 2,22% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp. 108.464.793.819,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1) Belanja Barang dan Jasa BLUD	117.955.552.000	110.874.681.359	94	108.464.793.819
Jumlah	117.955.552.000	110.874.681.359	94	108.464.793.819



1) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2019 sebesar Rp.117.019.284.749,- atau 88,43% dari anggaran sebesar Rp.132.334.602.000,-. Belanja Barang dan Jasa BLUD ini naik sebesar Rp.18.910.870.679,- atau sebesar 19,28% dari realisasi TA 2018 sebesar Rp.98.108.414.070,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
I	Belanja Pelayanan	101.217.605.000	96.436.498.425	95,25	96.436.498.425
1	Belanja Bahan	51.075.373.000	46.004.242.177	90,07	46.837.031.132
	a Blj. Bahan Obat	25.340.972.000	23.224.786.011	91,79	25.626.855.147
	b Blj. Bahan Alkes habis pakai	8.205.258.000	7.234.291.115	87,21	6.129.168.132
	c Blj. Bahan Laborat	4.300.160.000	3.886.962.768	88,74	3.726.670.020
	d Blj. Bahan Radiologi	1.141.357.000	737.375.375	64,61	655.203.187
	e Blj. Gas Medis	2.840.000.000	2.539.827.620	89,75	2.284.876.880
	f Blj. Bahan Medis Operasi	2.700.000.000	2.566.613.700	95,06	3.099.376.553
	g Blj. Bahan Makanan (Logistik) Pasien	4.277.626.000	3.731.554.588	87,23	3.410.349.713
	h Blj. Bahan Darah	2.100.000.000	2.079.735.000	99,04	1.863.820.000
	i Blj. Alat Bantu Kesehatan	50.000.000	3.096.000	6,19	40.711.500
2	Belanja Jasa Pelayanan	53.408.587.000	46.070.028.080	86,26	40.073.646.200
	a Blj. Jasa Pelayanan Medis & non medis	53.408.587.000	46.070.028.080	86,26	40.073.646.200
	b Blj. Jasa Insentif	0	0	0	0
3	Belanja Pemeliharaan	1.396.952.000	1.342.989.380	96,14	565.667.450
	a Blj. Pemeliharaan Dan Kalibrasi	380.000.000	376.492.900	99,08	200.832.300
	b Blj. Pem. Alat Kedokteran	845.452.000	835.921.480	98,87	288.108.150
	c Blj. Pem. Ruang Pasien	171.500.000	130.575.000	76,14	76.727.000
4	Belanja Barang dan Jasa	7.743.489.000	7.392.766.871	95,47	8.352.802.420
	a Blj. Bahan dan Alat Sanitasi	0	0		0
	b Blj. Pembersih dan Alat Kebersihan	1.035.480.000	1.034.431.374	99,90	995.538.944
	c Blj. Linen	254.690.000	248.705.000	97,65	129.550.000
	d Blj. Cetakam rekam medis/Cetakam Layanan Medis	552.408.000	541.400.500	98,01	797.533.900
	e Blj. Bahan	164.262.000	141.766.000	86,30	75.947.100